

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Transportasi berasal dari kata Latin “*transportate*”, *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pengangkutan atau pemindahan penumpang/barang dengan transportasi adalah untuk dapat mencapai tempat tujuan dan menciptakan/menaikkan utilitas atau kegunaan dari barang yang diangkut”.¹

“Transportasi dapat diklasifikasikan menurut macam/modal/jenisnya (*modes of transportation*) yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung, dan dari sudut teknis serta alat angkutnya.

1. Dari segi barang yang diangkut:
 - a. Angkutan umum (*passenger*);
 - b. Angkutan barang (*goods*);
 - c. Angkutan pos (*mail*)”.²
2. “Dari sudut geografis:
 - a. Angkutan antarbenua/kontinental;

¹ Gunawan Herry,S.E.,M.M,2014,*Pengantar Transportasi dan Logistik*,Jakarta:Raja Grafindo Persada,hal.1

² Ibid.hal.2

- b. Angkutan antar pulau;
- c. Angkutan antar kota;
- d. Angkutan antar daerah;
- e. Angkutan di dalam kota.

Jalan merupakan suatu kebutuhan yang sangat esensial dalam transportasi. Tanpa adanya jalan tak mungkin disediakan jasa transportasi bagi pemakainya. Jalan ditujukan dan disediakan sebagai basis bagi alat angkutan untuk bergerak dari suatu tempat asal ke tempat tujuannya. Unsur jalan dapat berupa jalan raya, jalan kereta api, jalan air, dalam jalan udara”.³

“Jalan juga dapat diklasifikasikan menurut jalan alam (*natural*) dan jalan buatan (*artificial*). Jalan alam merupakan pemberian alam dan karenanya tersedia bagi setiap orang tanpa (atau hampir tidak) adanya suatu beban ongkos pemakainya, seperti: jalan setapak, sungai, danau, dan udara. Sedangkan jalan buatan adalah jalan yang dibangun melalui usaha manusia secara sadar dengan sejumlah dana investasi bagi pembiayaan tertentu untuk membuat konstruksinya dan pemeliharaannya”.⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah guna mengatur kendaraan di jalan raya. Kendaraan berupa kendaraan umum maupun kendaraan angkutan barang. Salah satu isi dari Undang-undang tersebut adalah daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor. Bahwa setiap kendaraan memiliki pengelompokannya menurut kelas jalannya masing masing.

³ Ibid.hal.3

⁴ Ibid.hal.4

Pengelompokan ini didasarkan pada golongan kelas dari mulai kendaraan kecil hingga kendaraan besar. Guna dari penggolongan kendaraan ini adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan (jalan) dan juga mencegah kerusakan terhadap kendaraan pengangkut beban yang mengangkutnya. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah mengatur bahwa:

“Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan

- d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton”.⁵

Penggolongan jalan tersebut didasarkan pada beban angkut yang mampu dilewati oleh kendaraan yang merupakan dasar oleh Aparat Penegak Hukum maupun Dinas Terkait untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar, maka dari itu Aparat Penegak Hukum maupun Dinas terkait untuk memberikan sanksi kepada pelanggar.

Apabila terjadi kelalaian maka akan menimbulkan kerusakan jalan yang akan merugikan pengguna jalan lainnya. Dengan demikian, pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman. Dalam hal ini pihak yang berperan dalam menegakkan pelanggaran tonase jalan yang berlebihan adalah dinas perhubungan.

Lalu lintas menurut Undang-undang No 22 tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

“Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.”

“Setiap pengguna jalan dalam hal ini yaitu pengendara kendaraan bermotor wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang dan aturan lainnya sehingga terdapat satu

⁵ Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan di jalan raya”.⁶

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan pembawa muatan berat diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 307 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Tujuan suatu hukum pidana adalah memberikan sanksi kepada seseorang supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan bahkan mendidik atau mengarahkan seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan bisa diterima lagi oleh masyarakat. Sejauh ini telah banyak rambu-rambu yang telah dibuat oleh Dinas Perhubungan.

Rambu rambu lalu lintas menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

⁶<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/7849/3756>, diakses pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2019, pukul 16.30 WIB.

“Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.”

Rambu-rambu dimaksudkan agar pengendara dapat mematuhi peraturan yang ada dan mengerti segala akibat dari pelanggaran rambu-rambu tersebut. Apabila melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dimaksudkan agar pengguna jalan jera. Terutama untuk truk pembawa muatan barang ada aturan tertentu. Berat barang yang di bawa harus sesuai dengan peraturan yang ada. Jika melanggar akan ditindaklanjuti dengan penurunan barang.

“Penurunan barang dilakukan karena menyalahi aturan Over Dimensi Over Loading (ODOL). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), potensi kerugian negara akibat kelebihan tonase(overload) dan kelebihan dimensi kendaraan barang mencapai Rp.43 triliun. Angka tersebut merupakan rata-rata per tahun akibat perbaikan jalan. Apabila kelebihan muatan dan dimensi itu dapat diminimalkan, akan berdampak pada penghematan anggaran negara”.⁷ Apabila masih ada truk yang membawa muatan berlebih, maka sanksi tegasnya berupa tilang.

Tilang adalah sanksi pidana yang tegas bagi pelanggar aturan lalu lintas. Mengenai kendaraan bermuatan berlebih. Sanksi tilang berupa sanksi administrasi yang dilayangkan oleh Dinas Perhubungan Sukoharjo dan

⁷ <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/123328/pengawasan-dan-penindakan-harus-dijalankan>, diakses pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2019, pukul 16.45 WIB.

selanjutnya ditindak lanjuti oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo guna membayar sanksi administrasi tersebut.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan mengambil judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN GOLONGAN KENDARAAN YANG MELEBIHI TONASE OLEH DINAS PERHUBUNGAN”

B. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini disamping harus ditentukan obyek penelitian juga harus diadakan suatu pembatasan masalah terhadap obyek yang harus diteliti seberapa besar masalah yang akan dibahas, agar lebih diperoleh gambaran yang jelas.

Masalah-masalah yang timbul mungkin banyak sehingga perlu dilakukan pembatasan, yang tidak mungkin untuk dijelaskan secara keseluruhan. Agar penelitian ini dapat lebih terarah dan fokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, maka penelitian ini akan dibatasi pada proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan golongan kendaraan yang melebihi tonase yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Demikian Pembatasan masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas rambu-rambu terhadap pelanggaran yang dilakukan golongan kendaraan yang melebihi tonase oleh dinas perhubungan?
2. Bagaimana efektivitas penurunan barang terhadap pelanggaran yang dilakukan golongan kendaraan yang melebihi tonase oleh dinas perhubungan?
3. Bagaimana efektivitas tilang terhadap pelanggaran yang dilakukan golongan kendaraan yang melebihi tonase oleh dinas perhubungan?

D. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas rambu-rambu terhadap pelanggaran yang dilakukan golongan kendaraan yang melebihi tonase oleh dinas perhubungan.
2. Untuk mendeskripsikan efektivitas penurunan barang terhadap pelanggaran yang dilakukan golongan kendaraan yang melebihi tonase oleh dinas perhubungan.
3. Untuk mendeskripsikan efektivitas tilang terhadap pelanggaran yang dilakukan golongan kendaraan yang melebihi tonase oleh dinas perhubungan.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan penelaahan ilmu serta menambah literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan hukum ilmiah bidang pidana hukum selanjutnya.

2. Manfaat Praktisi

- a. Dapat memperluas pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai pelanggaran yang dilakukan golongan kendaraan yang melebihi tonase dilihat dari peranan dinas perhubungan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta sebagai bahan kajian.

F. Kerangka Pemikiran

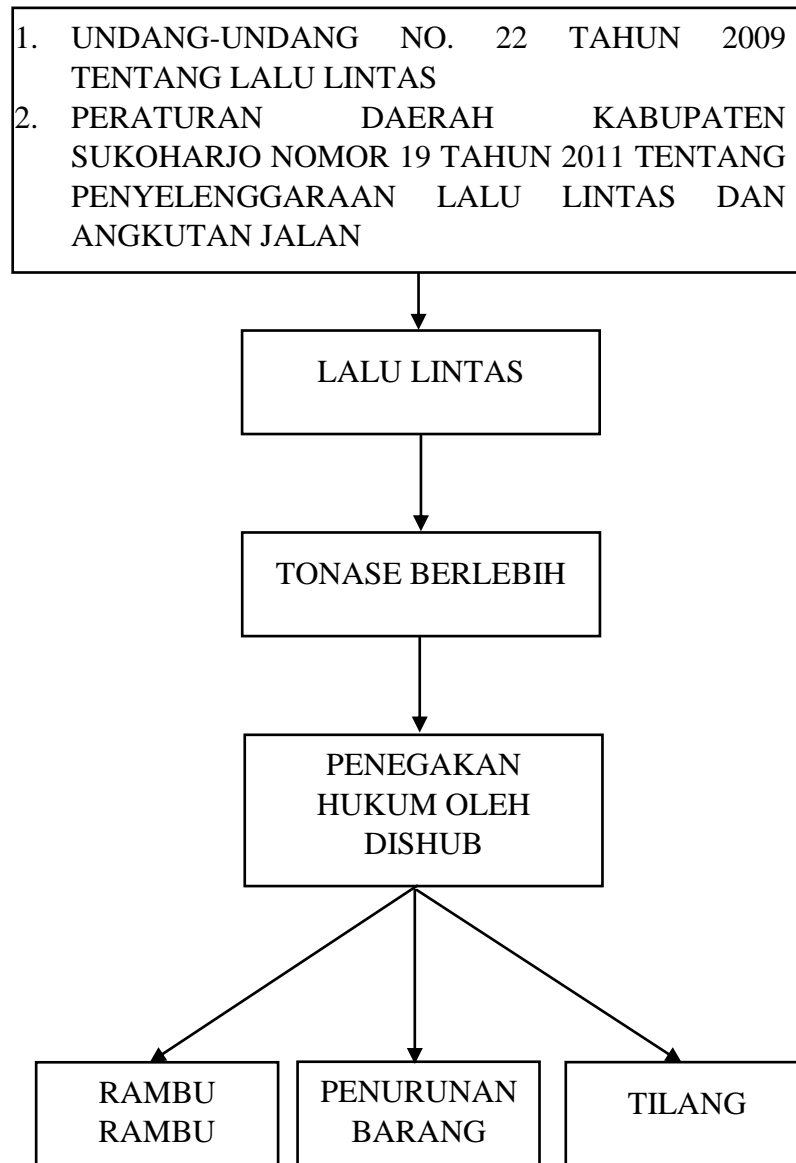
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 ayat (37) berbunyi :

“Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan”.⁸

Hal ini dapat dijelaskan bahwa pengguna jalan harus selalu mentaati aturan yang ada dan dengan mentaatinya pengguna jalan akan mendapatkan haknya dalam berlalu lintas. Namun apabila pengguna jalan tersebut tidak dapat mematuhi maka akan dikenakan sanksi berupa penegakan hukum dalam berlalu lintas. Dan hal ini masih sering terjadi pada pelanggaran truk yang membawa muatan barang. Sering kali mereka melanggar aturan yang ada.

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi maka dibuatlah suatu kerangka pemikiran penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan golongan kendaraan yang melebihi tonase oleh dinas perhubungan, maka dibuatlah kerangka pemikiran sebagai berikut :

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 ayat (37)



G. Metode Penelitian

“Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian seyogyanya selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada

hukum”.⁹ Agar tercapainya sasaran tujuan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

“Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripsi. Penelitian deskripsi adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, atau akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai saifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu”.¹⁰ Penelitian ini digunakan karena untuk memberi gambaran tentang penegakan hukum atas pelanggaran golongan kendaraan yang melebihi tonase jalan oleh Dinas Perhubungan.

2. Metode Pendekatan

“Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode ini mencakup penelitian terhadap efektivitas hukum yang merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*)”.¹¹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis untuk dijadikan penelitian adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo. Pemilihan lokasi ini dengan

⁹ Kudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 3.

¹⁰ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika. Hal. 10.

¹¹ Ibid. Hal. 31.

pertimbangan kasus yang akan diangkat terjadi di Sukoharjo dan sumber data terdapat pada kantor dinas perhubungan.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang berisi sejumlah keterangan atau fakta yang didapat dari hasil observasi maupun dokumen yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang berkaitan langsung dengan kasus yang akan diangkat oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data ini berupa bahan pustaka yang terdiri dari, sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)”.¹² Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- a. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- b. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut

¹² Ibid. Hal. 47.

terdiri atas: (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim”.¹³

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diinginkan, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara membaca atau mencatat data pada literatur-literatur yang berhubungan dengan kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Golongan Kendaraan yang Melebihi Tonase.

b. Studi Wawancara

Yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo untuk memperoleh data tentang kasus yang akan diteliti.

6. Metode Analisa

“Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat”.¹⁴

¹³ Ibid. Hal. 54.

¹⁴ Ibid. Hal. 105.

H. Sistematika

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) bab, dimana setiap bab saling berkaitan yang membentuk suatu kesinambungan. Sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penlitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Tinjauan Umum. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang Lalu Lintas, tinjauan umum tentang Rambu-rambu, tinjauan umum tentang Penurunan Barang, tinjauan umum tentang Tilang.

Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: 1) Bagaimana efektivitas rambu-rambu terhadap pelanggaran yang dilakukan golongan kendaraan yang melebihi tonase oleh dinas perhubungan; 2) Bagaimana efektivitas penurunan barang terhadap pelanggaran yang dilakukan golongan kendaraan yang melebihi tonase oleh dinas perhubungan; 3) Bagaimana efektivitas tilang terhadap pelanggaran golongan yang dilakukan kendaraan yang melebihi tonase oleh dinas perhubungan.

Penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.